

Rakornas Kepala Daerah se-Indonesia Bikin Macet Sentul

KABUPATEN BOGOR (IM)- Kemacetan panjang terjadi di Kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1) pagi, karena kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah se-Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC).

Pantauan di lokasi, kemacetan terjadi di beberapa ruas jalur sekitaran SICC sejak pukul 07.00 WIB, bermula di Simpang Bellanova dan persimpangan Hotel Harris. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari pintu keluar Tol Sentul Selatan dan pintu keluar Tol Sentul Barat menuju Bellanova. Kemudian, kemacetan juga terjadi di Jalan Raya Babakanmadang tepatnya mulai dari sekitaran SPBU hingga persimpangan dekat Hotel Harris.

Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto menjelaskan, Polres menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitaran SICC saat pelaksanaan Rakornas Kepala Daerah se-Indonesia. Kendaraan dari arah Sirkuit Sentul yang akan ke Bellanova melalui SICC dialihkan melalui Jalan Babakanmadang - Sentul City. Kemudian, kendaraan dari arah Babakanmadang yang

akan ke Bellanova melalui SICC dialihkan melalui Jalan Sentul City.

Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional, tergantung kepadatan volume kendaraan di sekitaran lokasi acara. "Kemungkinan saat buaran sama kedatangan (peserta Rakornas) saja. Pada saat acara dimulai, mobil dan semuanya sudah terparkir rapi, arus (lalu lintas) tetap dinormalkan," kata Ardian.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kepala daerah se-Indonesia. "Rakornas kembali dilaksanakan di Kabupaten Bogor setelah sebelumnya Rakornas serupa pernah sukses dilaksanakan pada 2019," kata Bayu.

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo membuka Rakornas Kepala Daerah 2023 sekaligus memberikan arahan kepada peserta Rakornas. Rakornas tahun ini mengangkat tema "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi".

● pp

Aceh Provinsi Termiskin di Sumatera, Warga Miskin Naik Jadi 818 Ribu Orang

BANDA ACEH (IM)- Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh masih bertahan sebagai Provinsi termiskin di Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang.

"Persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022," kata Dadan Supriadi, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh dalam rilis yang diterima, Selasa (17/1).

Dadan menyebutkan, kenaikan penduduk miskin di daerah pedesaan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen, sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen.

"Peningkatan penduduk miskin ini memang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia secara nasional. Aceh mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2022," sebutnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2022 disebabkan oleh garis kemiskinan yang mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Aceh pada September 2022 mengalami

kenaikan sebesar 6,57 persen jika dibandingkan dengan Maret 2022, yaitu dari Rp 579.227 per kapita per bulan menjadi Rp 617.293 per kapita per bulan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan.

"Komoditi makanan dan kebutuhan diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol/tuna/cakalang, sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Kenaikan pada garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada transportasi sebesar 21,00 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,93 persen," sebutnya.

BPS Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus menyajikan data statistik berkualitas dan tepat waktu. Indikator ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan secara merata di Aceh. ● pra

Aneka Satwa dan Penangkaran di Cibinong Situ Plaza



Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika melihat penangkaran di Cibinong Situ Plaza.

BOGOR (IM)- Giat penghijauan di wilayah kota berjudul 'Tegar Beriman' Kabupaten Bogor (Pembkab) Bogor terus menggenjot berbagai ruang kosong.

Bidikan Pembkab Bogor untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna memberikan ruang gerak bagi publik dan menjadi ruang tempat warga bersilaturahmi dan berekreasi bahkan sarana edukasi terus diperbanyak.

Salah satunya adalah Cibinong Situ Plaza. Tempat ini terus diupgrade dengan berbagai fasilitas, baik wifi public, sarana bermain anak hingga pembangunan aviari atau penangkaran hewan yang terdiri dari burung, iguana, kelinci, kura-kura

hingga unggas. Hal itu ditandai dengan pelepasan burung di Aviari oleh Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.

"Kita ingin meningkatkan kualitas taman Situ Plaza Cibinong, karena setiap harinya banyak dikunjungi masyarakat. Harapannya dengan adanya fauna yang terpelihara dengan baik masyarakat bisa mendapatkan gerai edukasi," ungkap Ajat.

Menurut Ajat, dengan aviari ini diharapkan dapat memberikan suasana baru bagi masyarakat yang berada di bawah taman kota.

"Silakan datang ke Aviari Cibinong Situ Plaza, gratis bebas biaya," ujarnya. ● gio

8 | Nusantara



PERSIAPAN MENYAMBUT TAHUN BARU IMLEK 2574

Warga membersihkan rupang (patung dewa) di Klenteng Hok Tek Tong atau TITD Dharma Nugraha Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (17/1). Warga keturunan Tionghoa mulai mempersiapkan berbagai sarana prasarana untuk menyambut tahun baru Imlek 2574 yang bertepatan dengan Shio Kelinci air.

Anggota Dewan Soroti Maraknya Resort di Desa Pancawati, Caringin

Besar kemungkinan bangunan-bangunan resort Glamping itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena lahan di Desa Pancawati tersebut sebelumnya pada Tahun 2016 diredis-tribusi kepada para petani penggarap yang secara aturan tidak boleh diperjualbelikan minimal sepuluh tahun.

CARINGIN (IM)- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menyoroti maraknya pembangunan resort, glamour camping (Glamping) dan kafe di lahan eks Hak Guna Usaha

(HGU) PT Rejo Sari Bumi di Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor.

Hal itu karena, besar kemungkinan bangunan-bangunan resort Glamping itu tidak memiliki Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), karena lahan di Desa Pancawati tersebut sebelumnya pada Tahun 2016 diredis-tribusi kepada para petani penggarap yang secara aturan tidak boleh diperjualbelikan minimal sepuluh tahun.

Karena tak ber-IMB, maka Pemkab Bogor pun dirugikan lantaran kehilangan potensi raih pajak atau menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemkab Bogor berpotensi kehilangan potensi PAD, karena tidak mungkin resort, Glamping dan kafe itu memiliki IMB, ijin usaha dan lain sebagainya," tutur Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Selasa (17/1).

Asep Wahyuwijaya menambahkan bahwa bangunan-bangunan tersebut yang berada di daerah perbukitan, merupakan daerah serapan air dan termasuk dalam Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau LP2B apakah bisa begitu saja diubah alih fungsi lahannya? Lalu kalau bisa dibangun, maksimal bangunan 30 persen dari total luas lahan atau disesuaikan dengan KDB (koefisien dasar bangunan)," tambah pria yang sedang menempuh pendidikan Doktor ini.

Kang AW mengatakan bahwa dengan potensi dari bidang industri, wisata dan lainnya, PAD Kabupaten

Bogor harusnya dua kali lipat dari raih PAD saat ini atau Tahun 2022 lalu.

"Potensi PAD Kabupaten Bogor bisa mencapai Rp 5 hingga 6 triliun atau mungkin lebih, hal itu bisa dicapai kalau semua stake holder bisa melaksanakan perannya atau sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Kang AW.

Pantauan di lapangan, dari Simpang Cikereteg hingga ke ujung Desa Pancawati, berdiri puluhan bangunan resort, Glamping dan kafe. Walaupun perizinannya dipertanyakan, Desa Pancawati menjadi titik destinasi favorit wisatawan selain Kawasan Puncak karena lokasinya dekat dengan Jalan Tol Bogor-Sukabumi. ● pra

Pasca Pandemi Covid-19, Ekonomi Kabupaten Bogor Mulai Bangkit

BOGOR (IM)- Pergerakan ekonomi di Kabupaten Bogor, mulai menggeliat bahkan sebagian besar mulai bangkit, seperti pabrik, ritel, hotel, restoran, UMKM, sudah mulai ramai pengunjung baik warga Bogor maupun warga wilayah lain.

Walau tiga tahun terakhir dihantam badai Pandemi Covid-19 yang telah meluluhlantakkan seluruh sendi perekonomian di seluruh dunia, kini setahap demi setahap mulai bangkit termasuk Kabupaten Bogor.

Dilihat dari indikator makro pembangunan Kabupaten Bogor sejak pandemi Covid-19, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor cukup mencengangkan dari -1,77% melesat naik jadi 3,55% dan bahkan semakin meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 5,20%.

Indikator lainnya seperti angka pengangguran juga meluncur turun sangat drastis, di mana pada tahun 2020 sebesar 14,29% dan pada tahun 2021 turun menjadi 12,22% sementara tahun 2022 turun lagi menjadi 10,64%.

Dari sisi daya beli masyarakat Kabupaten Bogor pun terus mengalami peningkatan yang tadinya tahun 2020 hanya Rp.10.317.000 per tahun setiap orang, pada 2021 meningkat jadi Rp.10.410.000 per tahun per orang, dan tahun 2022 menjadi Rp.10.860.000 per tahun per orang.

Ini sebagai akibat dari semakin baiknya indikator makro Kabupaten Bogor otomatis tingkat kemiskinannya juga turun sangat tercermin pada tahun 2020 angka kemiskinan berada di 7,69%, sempat naik karena pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Sejak tahun 2021 kemiskinan di Kabupaten Bogor terus menurun dari 8,13% pada tahun 2021, di tahun 2022 merosot jadi 7,73% berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

Bahkan di tahun 2022 Kabupaten Bogor berada di



urutan ke 11 dari 27 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Provinsi sebesar 8,40% sementara di Kabupaten Bogor sebesar 8,13%, sedangkan tahun 2022 angka kemiskinan Jabar sebesar 8,06% dan di Kabupaten Bogor berada di angka 7,73% (jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor berkurang sebanyak 16.500 jiwa).

"Ini luar biasa, tentu ini berkat kerja keras Pemkab Bogor dengan semua pihak. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Kabupaten Bogor mampu melakukan penurunan yang sangat drastis," tegas pihak BPS Kabupaten Bogor.

Selain itu, masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, Pemkab Bogor memfasilitasi dengan memagangkan mereka di sejumlah perusahaan dan pelayanan pelatihan di Balai Latihan Kerja. Total yang sedang mengikuti pelatihan sebanyak 325 orang.

Di bidang pendidikan, Pemkab Bogor fasilitasi dengan bebas biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan program beasiswa bagi 1.200 siswa berprestasi untuk jenjang Pendidikan S1.

Sisi dukungan infrastruktur kebijakan bantuan keuangan Satu Milyar Satu Desa (Samside) dampaknya sangat positif karena selain untuk

penguatan jalan dan pembuatan jalan juga untuk pertanian, perdagangan, mengurangi biaya transportasi dan efisiensi waktu.

Samside juga mendukung sektor ekonomi salah satunya untuk sentral ekonomi di desa, pembangunan sanitasi jaringan air bersih, pembangunan tower untuk daerah blank spot, jelasnya.

Sedangkan untuk program penurunan angka kemiskinan, dilakukan secara kolaborasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya, di antaranya, Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN-KIS daerah. Bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS, serta bantuan perlindungan kesehatan berupa bantuan uang untuk pengobatan bagi masyarakat yang benar-benar miskin.

"Pendekatan yang sudah dilakukan salah satunya bagaimana mengurangi beban hidup masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan mereka dan ditopang dengan pembiayaan usaha mikro, karena diharapkan keluarga miskin bisa meningkatkan dan membangun usaha, yang kami kolaborasi dengan lembaga usaha mikro, itulah strategi pendekatan kita melalui pendekatan per individu dan juga keluarga," tukas. ● gio

PDAM Tirtawening Bantah Jadi Pemicu Inflasi di Kota Bandung

BANDUNG (IM)- Kota Bandung menjadi wilayah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia, menyumbang 2,04 persen dari total inflasi nasional. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), andil inflasi selama 2022 dipengaruhi oleh sejumlah komoditas.

Antara lain, kenaikan harga bensin, tarif air minum PDAM, tarif ongkos angkutan dalam kota (angkot), dan harga pangan. Khusus harga air minum PDAM, kenaikannya mencapai 900 persen dari sebelumnya dibanderol Rp 1.000 per meter kubik (liter) naik menjadi Rp 9.000 per meter kubik pada Desember 2022.

Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, Sonny Salimi mempertanyakan kebenaran peran tarif air minum PDAM dalam mendorong terjadinya inflasi di ibu kota Provinsi Jabar tersebut. Dia menilai, masih banyak faktor lain yang menyebabkan tingginya inflasi selama setahun belakangan, selain kenaikan tarif air minum yang baru naik pada akhir 2022.

"Gimana bisa ujug-ujug penyesuaian tarif PDAM bisa mempengaruhi inflasi? Harus ditanyakan, validitas atau gimana cara menghitungnya. Penyesuaian tarif kita kan baru Desember ya, bisa enggak mempengaruhi dalam kurun satu tahun inflasi?" ucap Sonny saat dihubungi, beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, PDAM Tirtawening hanya melayani 38 persen dari total populasi Kota Bandung. Angka itu sekitar 170 ribu pelanggan dari 2,5 juta jiwa penduduk Kota Kembang. Sehingga, peran PDAM dalam tingginya inflasi di Kota Bandung, seharusnya tidak terlalu besar.

"Pertanyaan saya, kan berarti yang membayar PDAM ini baru 38 persen penduduk Kota Bandung, lalu kaitan dengan inflasi Kota Bandung apa?" kata Sonny menggugat data BPS.

Dia menerangkan, penyesuaian tarif air minum PDAM telah sesuai dengan regulasi yang ada dan melalui kajian serta evaluasi yang panjang. Sonny mengeklaim, tingginya inflasi di Kota Bandung dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya kenaikan tarif air minum PDAM.

"Kalau dikaitkan oleh inflasi, itu kan urusan daya beli urusan secara keseluruhan, bukan urusan PDAM barangkali yah," kata Sonny menyanggah.

Dia juga menyinggung tarif air minum PDAM yang saat ini dibanderol dengan harga Rp 9.000 per meter kubik, atau 1.000 liter. Sonny menilai, harga tersebut masih terjangkau jika dibandingkan pengeluaran rutin lain masyarakat, seperti biaya listrik dan paket internet.

"Air 1.000 liter itu harganya Rp 9.000 atau satu liternya hanya Rp 9 perak, mahal tidak sih? Coba lihat esensinya, orang bayar sebulan Rp 150 ribu-Rp 200 ribu sebulan satu rumah tangga untuk air minum, mahal gak sih?" kata Sonny.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, tarif air minum PDAM menyumbang setidaknya 1,17 persen di tingkat inflasi Kota Bandung. Meski begitu, Yana mengatakan, kenaikan harga air PDAM sudah melalui proses kajian panjang.

Menurut dia, cara lain untuk dapat menurunkan angka inflasi adalah dengan mengkaji tarif selain air minum, seperti biaya pengolahan limbah. Yana berusaha mencari solusi untuk menurunkan angka inflasi di Kota Bandung.

"Memang kemarin dari tingkat inflasi, tarif PDAM itu menyumbang 1,17 persen, dan memang ternyata itu ada beberapa komponen yang menyebabkan kenaikan, bukan hanya tarif air saja tapi pengolahan limbahnya, nah itu yang kemarin saya minta untuk dikaji lagi," ujar Yana saat ditemui di RSUD Ujungberung, Kota Bandung, Senin (16/1). ● pra